89

REFORMASI KURIKULUM KEHUTANAN

Dudung Darusman

Bogor, 23 Januari 2001

PENGANTAR

Reformasi kurikulum kehutanan yang diartikan dalam tulisan ini adalah perubahan kurikulum kehutanan dari yang berparadigma *"forest for people"* menjadi *"forest with people"* dan perubahan komposisi mata ajaran menjadi lebih kaya dengan ilmu-ilmu sosial.

Dalam pengertian seperti itu, reformasi kurikulum kehutanan sesungguhnya telah dimulai dan telah memiliki dorongan semangat yang tinggi sejak jauh sebelum reformasi kehutanan akibat krisis sekarang ini terjadi, yakni sejak diadakannya Konferensi Para Dekan Fakultas Kehutanan Se-Asia-Pasific di FAO Regional Office-Bangkok tahun 1990.

Pada saat itu telah disadari penuh bahwa persoalan dan tantangan pengelolaan hutan yang terberat adalah pada aspek sosial ekonomi, bahkan juga politik. Oleh karena itu disepakati agar sejumlah ilmu-ilmu sosial harus diintegrasikan secepat mungkin dalam kurikulum perguruan tinggi, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

KEMAJUAN REFORMASI KURIKULUM KEHUTANAN

Sejak saat konferensi itu dan beberapa pertemuan ilmiah berikutnya, di beberapa perguruan tinggi kehutanan di Indonesia perkayaan ilmu sosial dalam kurikulumnya berjalan cukup lancar dan maju. Kemajuan itu dapat dilihat dari 2 hal, pertama dari komposisi mata ajaran ilmu sosial dalam kurikulum, dan kedua dari bahasan atau substansi mata-mata ajaran non-ilmu sosial yang berorientasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

1. Perkayaan Komposisi Mata Ajaran

Di UGM, sebagaimana ditulis Awang (1999) kurikulumnya telah diperkaya dengan mata ajaran (wajib dan pilihan) yang cukup lengkap, yakni : Sosiologi Pedesaan, Pengusahaan Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Metode Penelitian Sosial, Antropologi Sosial, Sosiologi Kehutanan, Ekonomi Sumberdaya Hutan, Perencanaan Hutan, Agroforestry dan Penyuluhan Sumberdaya Hutan. Di IPB, sebagaimana ditulis Suharjito (1999), walalupun tidak selengkap di UGM dan UNHAS, telah cukup mengalami kemajuan dan perkayaan, sejalan dengan perkembangan kondisi staf pengajarnya.

Di UNMUL, sebagaimana ditulis Sardjono (1999), mata kuliah Kehutanan Masyarakat telah dikembangkan sesuai dengan keperluan tingkat pendidikan mulai jenjang Diploma, Sarjana, sampai Pasca-Sarjana. Sementara di UNHAS, sebagaiman ditulis Alam (1999), dari semula ada 7 mata ajaran yang termasuk ilmu-ilmu sosial sedang dikembangkan menjadi 13 mata ajaran dengan spektrum yang lebih luas dan dalam. Bahkan di UNHAS sejak semula sudah ada mata ajaran yang menyangkut masalah penggembalaan ternak masyarakat di dalam hutan.

2. *Pergeseran Substansi Mata Ajaran*

Substansi dari mata-mata ajaran non-ilmu sosial cenderung semakin memperhatikan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat golongan menengah ke bawah. Beberapa tokoh pendidikan di Fakultas Kehutanan IPB mengemukakan perlunya pergeseran orientasi sistem silvikultur, dari yang cenderung homogen menjadi heterogen dari berbagai aspek, yang sesuai dengan budaya dan keperluan Bangsa Indonesia, materi kuliah Teknologi Hasil Hutan sudah beberapa tahun diorientasikan pada teknologi sederhana dan skala kecil, yang sesuai untuk pemberdayaan masyarakat, baik untuk jenis produk kayu yang konvensional, maupun untuk berbagai jenis hasil hutan non-kayu. Juga para tokoh tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi akan sangat bersinergi apabila melibatkan masyarakat sekitar, dengan jenis peran yang sesuai.

Kemajuan reformasi kurikulum kehutanan seperti diuraikan di atas dalam perjalanannya memang mengalami ***kendala-kendala struktural dan fungsional*** yang cukup berat, yakni :

a. Batasan maksimum jumlah SKS dalam kurikulum, serta batas mata ajaran wajib yang harus ada menurut kurikulum nasional, yang sangat mengikat.
b. Batasan maksimum waktu studi.
c. Keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan pengajaran.
d. Keterbatasan ketersediaan staf pengajar di kelas, di lab., dan di lapangan.
e. Keterbatasan kapasitas intelektual anak/peserta didik.

Dalam masa reformasi sekarang ini, kendala struktural (*a* dan *b*) cenderung dapat dicairkan dengan "keberanian", sementara kendala fungsional tetap harus diatasi secara bertahap. Itulah perjuangan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan oleh para profesional di bidang kehutanan masyarakat.

TANTANGAN DAN KENDALA LAPANGAN

Reformasi kurikulum hanyalah jalan, sedangkan tujuan akhirnya adalah penetapan dan penerapan kebijakan pengelolaan hutan yang menyertakan peran masyarakat di lapangan. Kemajuan di lapangan ini memang masih jauh dari apa yang diharapkan. Bukan karena kurikulum pendidikannya yang kurang tapi seringkali karena tantangan dan kendala lain dari para pemegang jabatan, baik di Pemerintah maupun di Perusahaan, atau para pengelola hutan di lapangan. Masih banyak ditemukan tantangan dan kendala sebagai berikut.

1. Ketidak-tahuan, kekurang-sadaran, dan kekurang-sungguhan para pejabat dalam hal apa dan bagaimana menyertakan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
2. Kurangnya motivasi para pejabat untuk melakukan perubahan, sekalipun disadari pentingnya, karena masa kerja (tenurial) jabatan yang relatif pendek, yang kalaupun tercapai keberhasilannya nanti tidak dapat masuk ke dalam penilaian kinerja masa jabatannya sekarang.
3. Sikap arogan para pejabat karena merasa pihak yang menentukan keputusan akhir, sehingga hubungan dengan pihak lain cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan dan keamanan.
4. Kekurang-terbukaan dan kekurang-jujuran para pejabat dalam memberikan data dan informasi, sehingga sekalipun konsepnya baik, pelaksanaannya sering menyimpang, karena didasarkan pada data dan informasi yang tidak tepat dan akurat.

Kesemua itu terasa masih sangat kental di lapangan, sehingga sangat menghambat perkembangan kehutanan masyarakat di tanah air ini. Ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengusaha di sebahagian besar wilayah, hendaknya dapat menghentak kesadaran para pejabat untuk merubah sikap dan perilaku mereka.

Darusman (2000) dalam makalahnya yang berjudul "Dimensi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Hutan" mengemukakan argumentasi yang menyeluruh tentang tidak mungkinnya pengelolaan hutan tanpa menyertakan peran masyarakat. Tinggallah para pengambil keputusan menyesuaikan diri menerapkannya, kalau tidak masyarakat akan semakin kuat memaksanya.

PENUTUP

Reformasi kurikulum kehutanan, dalam arti semakin berorientasi pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kehutanan, telah berjalan cukup maju dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, namun masih perlu diperjuangkan terus, sehingga kurikulum beserta faktor-faktor penunjangnya mampu menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu hutan kemasyarakatan.

Perjuangan yang lebih berat, justru tampaknya terlihat pada upaya merubah sikap dan perilaku para pejabat, baik di pemerintahan maupun di perusahaan, sehingga menyadari, menghayati dan menerapkan prinsip kehutanan masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya.

BAHAN BACAAN

Alam, Syamsu. (1999). Kurikulum Kehutanan Masyarakat yang Sedang Berjalan dan yang Akan Datang di Universitas Hasanuddin. Prosiding Lokakarya Pengembangan Kurikulum Kehutanan Masyarakat pada Pendidikan Kehutanan. Lab. Poleksos Fakultas Kehutanan IPB, 27 September 1999.

Awang, San Afri. (1999). Kehutanan Masyarakat Sebagai Paradigma Kehutanan Abad 21. Prosiding Lokakarya Pengembanan Kurikulum Kehutanan Masyarakat pada Pendidikan Kehutanan. Lab. Poleksos Fakultas Kehutanan IPB, 27 September 1999.

Darusman, Dudung. 2000. Dimensi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Hutan. Paper Fakultas Kehutanan IPB. Tidak diterbitkan.

Sardjono, Mustafa Agung. 1999. Status dan Persepektif Kurikulum Kehutanan Masyarakat di Universitas Mulawarman. Prosiding Lokakarya Pengembangan Kurikulum Kehutanan Masyarakat pada Pendidikan Kehutanan. Lab. Poleksos Fakultas Kehutanan IPB, 27 September 1999.

Suharjito, Didik. 1999. Kebutuhan Pengembangan Kurikulum Kehutanan Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan yang Mengutamakan Masyarakat. Prosiding Lokakarya Pengembangan Kurikulum Kehutanan Masyarakat pada Pendidikan Kehutanan. Lab. Poleksos Fakultas Kehutanan IPB. 1999.